



Pangkas Anggaran 11 Persen Per OPD

Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo

KULON PROGO - Program makan bergizi gratis (MBG) gagasan Presiden Prabowo, memberi dampak besar bagi jalannya pemerintahan daerah. Lantaran, pemerintah daerah perlu mengencangkan ikat pinggang anggarannya. Seperti yang dilakukan Pemkab Kulon Progo yang memangkas anggaran tiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Informasi yang didapat *Radar Jogja*, setiap OPD perlu memangkas anggaran sebesar 11 persen untuk dialokasikan pada program MBG. Hal ini didasari dengan

keluarnya surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo nomer 000/2735 tentang Permintaan Pengurangan Anggaran Perangkat Daerah pada RAPBD 2025.

Isi surat menyatakan, pemkab harus mengalokasikan 7,75 persen pendapatan asli daerah (PAD) untuk makan bergizi sehat. Namun, setelah dianggarkan dari dana transfer umum pemkab masih belum memenuhi alokasi dana itu. Kekurangan itu, membuat pemkab melakukan pengurangan alokasi belanja perangkat daerah sebesar 11 persen.

Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono menjelaskan terkait pemangkasan. Pemkab Kulon Progo memang-

diminta menyediakan sejumlah alokasi anggaran untuk makan bergizi sehat. Tentunya, pemkab perlu merubah berbagai plot anggaran pada RAPBD 2025. Padahal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara telah disampaikan beberapa waktu lalu. "Sejak perencanaan APBD 2025 seperti KUA PPAS belum dimasukkan program itu, dari situ sumber anggarannya kan belum ada," ucapnya.

Triyono menyampaikan, untuk memenuhi anggaran makan bergizi, pemkab perlu memutar otak. Lantaran, plot anggaran telah direncanakan sejak beberapa bulan lalu, dan berubah menjelang penetapan. Angka pemangkasan didasari dengan jumlah kebutuhan

untuk membiayai program makan bergizi. Perhitungan biaya makan bergizi didasari kategori fiskal masing-masing daerah. Kulon Progo masuk dalam kategori fiskal rendah, sehingga ditetapkan program makan bergizi menggunakan anggaran 7,75 persen dari PAD. "Setelah disimulasikan, ternyata belum cukup sehingga perlu pemangkasan," ucapnya.

Triyono menyampaikan, pemangkasan anggaran dilakukan semua OPD di Kulon Progo. Tentunya akan berdampak pada kegiatan dan program yang nantinya akan berjalan di 2025. Secara spesifik, pemangkasan lebih banyak pada pengurangan anggaran konsumsi dan perjalanan dinas. Dengan harapan program utama

setiap OPD sesuai ketugasannya tidak berpengaruh besar setelah dipangkas.

Sementara itu, Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifudin menyampaikan makan bergizi memang membebani daerah. Akan tetapi, program tetap harus berjalan karena merupakan prioritas dari pemerintah pusat. Hanya saja perlu penyesuaian, terutama pemerintah daerah. "PAD Kulon Progo perlu digenjot lagi," ucapnya.

Aris menyampaikan, Pemkab perlu memperkuat sektor PAD. Pasalnya, PAD Kulon Progo tergolong kecil. Sehingga, saat ada perubahan anggaran untuk program tertentu seperti makan bergizi gratis, pemkab tak harus melakukan pemangkasan. (gas/prafj)

ADA 28 OPD YANG DIPANGKAS

- BKPP Rp 451 juta,
- Kesbangpol Rp 183 juta,
- BKAD Rp 530 juta,
- BPBD Rp 93 juta,
- Bappeda Rp 250 juta,
- Dukcapil Rp 143 juta,
- Dinbud Rp 45 juta,
- DKP Rp 56 juta,
- Dinkes Rp 831 juta,
- Diskominfo Rp 442 juta,
- DLH Rp 461 juta,
- Dinpar Rp 123 juta,
- DPUPK Rp 3,6 miliar,
- Dinas pemberdayaan masyarakat dalduk Rp 109 juta,
- DPMPPT Rp 58 juta,
- Dikpora Rp 2,6 miliar,
- Dinas perdagangan Rp 315 juta,
- Dishub Rp 606 juta,
- Dinkop Rp 122 juta,
- Dinas perpustakaan Rp 114 juta,
- Dinas Pertanahan Rp 254 juta,
- Dispertapa Rp 326 juta,
- Dinsos Rp 174 juta,
- Disnaker Rp 230 juta,
- Irda Rp 150 juta,
- Satpol PP Rp 239 juta,
- Sekda Rp 977 juta,
- Sekwan Rp 1,5 miliar